

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya laut yang cukup melimpah. Secara historis, budaya maritim sebagai bangsa bahari sangat kuat diwariskan sejak zaman nenek moyang. Indonesia mempunyai pengaruh yang dominan di wilayah Asia Tenggara dengan armada lautnya yang kuat pada masa kerajaan. Pelaut-pelaut Nusantara telah tampil sebagai penjelajah samudera dan menguasai perairan sejak 1500 tahun silam (Dick, 2005).

Akan tetapi kehadiran pihak kolonial yang menjajah Indonesia selama lebih kurang 350 tahun telah menjadikan Indonesia kehilangan jati diri sebagai negara maritim. Penguasaan bangsa-bangsa asing atas perairan Nusantara menyebabkan Indonesia kehilangan infrastruktur, budaya, politik dan visi ekonomi. Bangsa Indonesia yang pernah berjaya di era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit terpaksa kembali lahir dari titik nol (Limbong, 2015).

Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, wacana mengembalikan Indonesia sebagai poros maritim dunia kembali bergulir. Salah satu yang melatarbelakangi hal tersebut adalah dengan membaca kembali sejarah Indonesia. Pemerintah mengakui bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan lebih terkonsentrasi pada wilayah daratan. Dengan perairan laut seluas total 5,8 juta km<sup>2</sup> (berdasarkan Konvensi PBB tahun 1982), pemanfaatan laut sebagai salah satu sistem sumberdaya hingga saat ini dirasa belum optimal (Resosudarmo Dkk, 2002).

Berbagai kebijakan dan produk undang-undang telah dirumuskan untuk mewujudkan negara maritim yang berdaulat dan sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (PERMEN-KP, 2015). Dalam konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI), sektor kelautan telah masuk sebagai salah satu sektor prioritas dari tujuh sektor lainnya.

Oleh karena itu, arah pembangunan ke depan perlu menitikberatkan pada pengoptimalan potensi kelautan sebagai upaya meningkatkan perekonomian bangsa, mengingat potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia 7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Komnas Kajiskan, 2013). Pembangunan berbasis kelautan, selain dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan juga dapat meningkatkan kualitas hidup nelayan dan kelompok masyarakat pesisir yang menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian.

Menurut Dahuri (2002) pembangunan kelautan hendaknya diarahkan untuk mendapatkan 4 tujuan secara seimbang, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan; (2) peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil; (3) terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdaya kelautan; (4) menjadikan laut sebagai pemersatu tegaknya kedaulatan bangsa.

Pengertian kemaritiman secara umum diterjemahkan oleh Dewan Kemaritiman Indonesia sebagai kegiatan laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan, serta eksplorasi, eksploitasi atau penangkapan ikan. Dalam konteks pembangunan

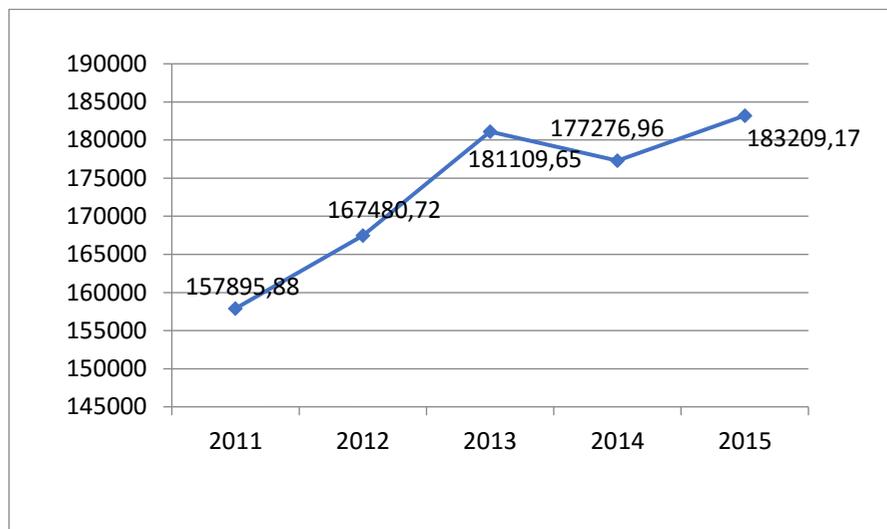
kemaritiman, sektor perikanan menjadi salah satu sektor penting yang perlu diperhatikan. Pembangunan sektor perikanan akan berkontribusi dalam mewujudkan visi kemaritiman. Ketika pendapatan dan kualitas hidup nelayan atau petani ikan telah meningkat, maka secara otomatis kehidupan nelayan atau petani ikan akan lebih maju dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi wilayahnya (Sutiardi, 2001).

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 sebagai bentuk pengejawantahan kemandirian daerah. Dalam undang-undang tersebut, negara memberikan kesempatan kepada pemerintah yang berada di daerah untuk merumuskan kebijakan rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Fondasi pembangunan diletakan dengan memberi otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya masing-masing.

Salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah yaitu dalam ukuran Pendapatan Domestik regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan besarnya tingkat pendapatan rata-rata yang diperoleh masyarakat (Sutiardi, 2001). Maka dari itu, upaya untuk meningkatkan peran dan kontribusi suatu sektor terhadap PDRB harus selalu dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang perlu diprioritaskan pada hasil komoditas. Peningkatan PDRB juga diharapkan dapat berpengaruh dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia di suatu daerah sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.

Menurut Tahir (2002), hubungan antara mata pencaharian masyarakat dengan keadaan geografis merupakan suatu kekuatan dalam upaya mengelola sumberdaya secara berkelanjutan. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menjelaskan bahwa daerah provinsi berwenang mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai, sementara daerah kabupaten/kota berwenang mengelola wilayah laut sepertiga dari batas kewenangan daerah provinsi atau sejauh 4 mil dari garis pantai. Jenis kewenangan tersebut mencakup regulasi kegiatan eksploitasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Kewenangan tersebut terwujud dalam bentuk pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, serta penegakan hukum.

Kota Tegal merupakan sebuah daerah kotamadya yang dikenal sebagai Kota Bahari. Kota yang berada di pesisir utara Jawa Tengah ini memiliki garis pantai sepanjang 10,2 kilometer. Pada tahun 2013 pemerintah Kota Tegal memiliki cita-cita menjadikan Tegal sebagai Kota Maritim. Visi Tegal Maritim menjadi sebuah formulasi dengan upaya mengoptimalkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya sosial yang dimiliki Kota Tegal. Cita-cita tersebut berkelindan dalam misi Kota Tegal tahun 2014-2019 dengan salah satu poin yang berbunyi “Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal”. Sejalan dengan slogan Kota Bahari, maka sudah semestinya pemerintah Kota Tegal dapat merancang strategi pembangunan ekonomi sektor kelautan, khususnya sektor perikanan sebagai representasi dari karakter kehidupan masyarakat Kota Tegal.



Sumber: BPS Kota Tegal, 2016

### GAMBAR 1.1

Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan Kota Tegal Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perikanan dikategorikan sebagai sub sektor di dalam sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan Kota Tegal sejak tahun 2011 hingga 2015 cenderung fluktuatif. Dapat dilihat pada gambar 1.1 di mana pada tahun 2012 PDRB sub sektor perikanan Kota Tegal mengalami pertumbuhan meningkat dari yang semula 157.898,88 juta rupiah pada 2011 menjadi 167.480,72 juta rupiah atau 2,19 persen. Di tahun 2013, pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan meningkat sebanyak 2,24 persen atau 181.109,65 juta rupiah. Akan tetapi pada tahun 2014 PDRB sub sektor perikanan hanya tumbuh 2,09 persen atau 177.276,96 juta rupiah. Pada 2015, PDRB sub sektor tersebut kembali mengalami kenaikan pertumbuhan sebanyak 2,05 persen atau 183.209,17 juta rupiah.

**TABEL 1.1**  
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kota Tegal  
Tahun 2011-2015

<b>Sub Sektor</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Tanaman Pangan	0,29	0,27	0,25	0,18	0,17
Tanaman Holtikultura Semusim	0,39	0,36	0,32	0,29	0,28
Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanaman Holtikultura Tahunan dan Lainnya	0,62	0,56	0,52	0,49	0,47
Perkebunan Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peternakan	2,09	2,01	1,94	1,87	1,83
Jasa Pertanian dan Perburuan	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07
Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Perikanan</b>	<b>2,15</b>	<b>2,19</b>	<b>2,24</b>	<b>2,09</b>	<b>2,05</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5,60</b>	<b>5,47</b>	<b>5,35</b>	<b>5,00</b>	<b>4,87</b>

Sumber: BPS Kota Tegal, 2017

Sub sektor perikanan berperan sebagai kontributor utama dalam sembilan sub sektor yang terdapat di PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kota Tegal. Dapat dilihat pada tabel 1.1 di mana dalam kurun waktu lima tahun, kontribusi PDRB sub sektor perikanan selalu mengungguli sub sektor yang lain. Sub sektor Peternakan berada di urutan kedua sebagai penyumbang PDRB terbesar, disusul kemudian sub sektor Tanaman Holtikultura Tahunan yang berada di urutan ketiga, sedangkan sub sektor Tanaman Holtikultura Semusim dan sub sektor Tanaman Pangan berada masing-masing di urutan ke empat dan kelima sebagai penyumbang PDRB. Ada pun

sub sektor yang tidak memberikan kontribusi terhadap PDRB seperti sub sektor Perkebunan Semusim, Perkebunan Tahunan sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu dikarenakan sumber daya sub sektor tersebut tidak dimiliki Kota Tegal.

Untuk mengetahui suatu sektor dianggap memiliki keunggulan kompetitif dan dianggap sebagai sektor basis, diperlukan sebuah pengukuran konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan peranan industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Sektor basis adalah sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di dalam suatu wilayah perekonomian. Perhitungan basis *location quotient* (LQ) tersebut menggunakan variabel PDRB atas suatu kegiatan dalam struktur ekonomi daerah (Licolin Arsyad, 1999).

**TABEL 1.2**  
Perhitungan Location Quotient Sub Sektor Perikanan Kota Tegal Tahun 2011-2015

2011	2012	2013	2014	2015	Rerata LQ
2,18	2,21	2,22	2,15	2,15	2,18

Sumber: BPS Kota Tegal, 2016 (diolah)

Berdasarkan perhitungan LQ, sub sektor perikanan Kota Tegal 2011-2015 menunjukkan nilai  $LQ > 1$ , dapat dilihat melalui tabel 1.2 di mana pada tahun 2011 Nilai LQ sebesar 2.1773824. Pada tahun 2012 nilai LQ sebesar 2,2089752. Pada tahun 2013 nilai LQ berubah menjadi 2,2224913. Tahun 2014 nilai LQ menjadi sebesar 2,1485689. Pada tahun 2015 nilai LQ berubah menjadi 2,1488369. Dengan rata-rata LQ 2,181250985 atau  $LQ > 1$  berarti dapat disimpulkan bahwa sub sektor perikanan merupakan salah satu sektor basis yang dimiliki Kota Tegal.

Perikanan Kota Tegal merupakan sub sektor yang potensial untuk lebih dikembangkan. Dengan adanya otonomi daerah, maka diharapkan pemerintah dapat membuat regulasi yang menguntungkan bagi masyarakat. Selain itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk menggali dan mengelola potensi perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraan.

Peran sub sektor perikanan dalam PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sektor basis dan sub sektor kontributor utama dapat memperlihatkan bahwa perikanan di Kota Tegal memiliki peluang dan potensi untuk berkembang menjadi jantung perekonomian daerah sesuai apa yang tertuang di dalam visi misi Kota Tegal. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai daya saing dan peranan sub sektor perikanan terhadap tenaga kerja dan pendapatan serta strategi pengembangannya dalam kerangka pembangunan maritim Kota Tegal.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup pembuktian apakah sub sektor perikanan Kota Tegal berdaya saing. Selain itu, bagaimana dampak yang diberikan sub sektor perikanan Kota Tegal terhadap pembangunan wilayah berdasarkan indikator penyerapan tenaga kerja dan pendapatan. Serta bagaimana strategi pengembangan sub sektor perikanan yang berada di Kota Tegal. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2011-2015.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana daya saing sub sektor perikanan Kota Tegal?
2. Bagaimana dampak yang diberikan sub sektor perikanan Kota Tegal terhadap pembangunan wilayah berdasarkan indikator tenaga kerja dan pendapatan?
3. Bagaimana strategi pengembangan sub sektor perikanan Kota Tegal?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui daya saing sub sektor perikanan di Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui dampak sub sektor perikanan terhadap pembangunan wilayah berdasarkan indikator tenaga kerja dan pendapatan.
3. Untuk mengetahui strategi pengembangan sub sektor perikanan Kota Tegal.

**E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik
  - a. Sebagai bahan pustaka, informasi dan referensi bagi akademisi dan peneliti.
  - b. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktik

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan di pemerintahan Kota Tegal dalam peranannya untuk mengembangkan sub sektor perikanan Kota Tegal.

